

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## BP3TKI BANDUNG TAHUN 2020



BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BANDUNG  
Jalan Soekarno – Hatta No. 587 Telp. 022-7333212/Fax. 022-7336965 Bandung 40287  
e-mail : [bp3tkibandung@bnp2tki.go.id](mailto:bp3tkibandung@bnp2tki.go.id)



## KATA PENGANTAR

Dengan Memanfaatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Bandung dapat diselesaikan dengan menggunakan pedoman penyusunan LAKIP yang baru berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP ini dibuat guna memenuhi kewajiban setiap unit satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan selama satu tahun anggaran kepada atasan.

Isi dari laporan ini menguraikan seluruh aktivitas secara rinci dan sistematis dengan menggunakan metode LAKIP yang menggambarkan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi, Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan.

Mudah-mudahan Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UPT BP2MI Jawa Barat Tahun 2020 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, 12 Januari 2021  
Kepala,

Ttd.

Drs. Ade Kusnadi, M.M.  
NIP. 19651212 199203 1 003

**DAFTAR ISI**

	<b>HAL</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Aspek Strategis	3
D. Permasalahan ( <i>Issue Strategis</i> )	3
E. Maksud dan Tujuan	4
F. Ruang Lingkup	4
G. Struktur Organisasi dan Pegawai	4
H. Dasar Pelaksanaan	6
I. Sistematika Penyajian	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis BP3TKI Bandung Tahun 2020-2024	10
B. Program dan Kegiatan	17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2020	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengelolaan Kinerja	25
B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020	30
C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020	31
D. Akuntabilitas Keuangan	42
E. Kendala	44
F. Tindak Lanjut	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

**DAFTAR TABEL**

	<b>HAL</b>
<b>Tabel 1.</b> Jumlah Pegawai UPT BP2MI Bandung Tahun 2020	6
<b>Tabel 2.</b> Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan UPT BP2MI Bandung	11
<b>Tabel 3.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja UPT BP2MI Bandung	12
<b>Tabel 4.</b> Target Kinerja UPT BP2MI Bandung	13
<b>Tabel 5.</b> Arah Kebijakan dan Strategi UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024	15
<b>Tabel 6.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Kelembagaan	17
<b>Tabel 7.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Penyiapan	17
<b>Tabel 8.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Perlindungan	18
<b>Tabel 9.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Bagian Tata Usaha	19
<b>Tabel 10.</b> Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
<b>Tabel 11.</b> Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020	21
<b>Tabel 12.</b> Reviu Target Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung	23
<b>Tabel 13.</b> Kategori Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020	25
<b>Tabel 14.</b> Pengukuran Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020 (Per Triwulan)	26
<b>Tabel 15.</b> Pengukuran Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020	28
<b>Tabel 16.</b> Hasil Evaluasi Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020	30
<b>Tabel 17.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesatu	31
<b>Tabel 18.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua	33
<b>Tabel 19.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketiga	33
<b>Tabel 20.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keempat	34
<b>Tabel 21.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kelima	35
<b>Tabel 22.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keenam	35
<b>Tabel 23.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketujuh	36
<b>Tabel 24.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedelapan	37
<b>Tabel 25.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesembilan	38
<b>Tabel 26.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesepuluh	39
<b>Tabel 27.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesebelas	41
<b>Tabel 28.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua belas	42
<b>Tabel 29.</b> Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung Tahun 2020	43
<b>Tabel 30.</b> Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung Per Jenis Belanja Tahun 2020	44
<b>Tabel 31.</b> Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung berdasarkan Belanja Tahun 2020	44

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT BP2MI Bandung serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, semua pimpinan Instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja mulai eselon II ke atas secara berjenjang, maka disusunlah LAKIP UPT BP2MI Bandung Tahun 2020.

Menyikapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, UPT BP2MI Bandung ke depan menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dan harus semakin cermat dalam menyusun perencanaan agar lebih fokus, dan dapat menjawab berbagai persoalan.

Berdasarkan Visi, Misi dan tujuan UPT BP2MI Bandung yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategi UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024, terdapat 12 sasaran yang akan dicapai yaitu:

- 1) Tersedianya Peta Potensi CPMI;
- 2) Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2PMI;
- 3) Meningkatnyapelayanan PMI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai;
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural;
- 5) Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan;
- 7) Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna;
- 8) Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan;
- 9) Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro;
- 10) Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah;

- 11) Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan;
- 12) Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi.

Sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai dalam pelayanan penempatan PMI, dinilai dari Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2020, yaitu:

- 1) Jumlah Potensi CPMI;
- 2) Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN;
- 3) Penempatan PMI terampil dan profesional;
- 4) Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan;
- 5) PMI yang ditempatkan pemerintah;
- 6) Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI;
- 7) Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI;
- 8) Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum;
- 9) Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen;
- 10) Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural;
- 11) Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha;
- 12) Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan;
- 13) Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha;
- 14) Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI;
- 15) Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya;
- 16) Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal;
- 17) Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel;
- 18) Nilai AKIP;
- 19) Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).

Adapun ringkasan capaian kerjanya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**RINGKASAN CAPAIAN KINERJA**  
**TAHUN 2020**

NO	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI	6.000	1.985	33,08
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	8 lokasi	8 lokasi	100
3.	Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional	32.000 PMI	731 PMI	2,28
4.	Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	90%	100%	111,11
5.	Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah	1.000 PMI	188 PMI	18,8
6.	Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	165,75%	165,75
7.	Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	30%	41,44%	138,13
		Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	3,47%	3,47
8.	Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	10%	0%	0%
		Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural	90%	60,70%	67,44
9.	Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembang kan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	350 orang	0 orang	0
		Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	30 orang	0 orang	0

NO	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha	32%	0%	0
		Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI	792 PMI	0 PMI	0
		Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	10%	0%	0
10.	Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	30 orang	22 orang	73,33
11.	Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 bulan	12 bulan	100
		Nilai AKIP	86	88,03	102,36
12.	Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	75%	50%	66,67

## **KENDALA**

### **1. Seksi Penyiapan Penempatan**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Penyiapan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya sistem Finger Print pada Penerbitan E-KTKLN (tidak ada fisik berupa Kartu) masih banyak PMI/CPMI yang mempertanyakan bukti bahwa E-KTKLN telah selesai diproses.

### **2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**

Kendala dalam pelaksanaanTupoksi yang terdapat pada Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesulitan dalam menangani kasus mencari alamat PMI / memberikan info ke Keluarga PMI tentang permasalahan PMI dikarenakan tidak ada anggaran.
- 2) Pemanggilan P3MI untuk mediasi sangat sulit dikarenakan P3MI apabila dipanggil jarang yang datang bahkan banyak P3MI yang tutup.

- 3) *Counter* Bandara di Husein Sastranegara sudah tidak ada sehingga mengakibatkan pendataan keberangkatan dan kepulangan PMI tidak maksimal.
- 4) Edukasi kewirausahaan harus melibatkan mantan PMI Korea yang agak sulit untuk mendapatkannya dan kebanyakan sudah memiliki usaha sendiri.

### **3. Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya data dan informasi mengenai lowongan pekerjaan di sektor formal untuk tujuan Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya untuk diinformasikan kepada pencari kerja.
- 2) Masyarakat pencari kerja banyak yang belum mengetahui terkait adanya website *jobsinfo (jobsinfo.bnpp2tki.go.id)* dan cara menggunakannya.

### **4. Sub Bagian Tata Usaha**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Masuknya Laporan dari setiap Seksi dan Satuan Kerja daerah masih sering terlambat.

## **TINDAK LANJUT**

### **1. Seksi Penyiapan dan Penempatan**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas memberikan penjelasan kembali mengenai kebijakan tentang perubahan KTKLN menjadi E-KTKLN.

### **2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Disnakertrans / P4TKI / LTSP walaupun info yang didapat agak terlambat.
- 2) Membuat surat ke Kedutaan walaupun jarang ada balasan.



- 3) Sudah menemui pihak-pihak yang berkepentingan dan juga untuk sementara Petugas Pendataan menunggu di depan pintu keluar.
- 4) Mencari informasi ke para mantan TKI Korea untuk mendapatkan data TKI Korea yang belum memiliki usaha sendiri.

### **3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan BP2MI (Direktorat Kerjasama Luar Negeri dan Direktorat Promosi) mengenai lowongan kerja yang tersedia di wilayah Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya;
- 2) Menjelaskan prosedur mendaftar melalui website [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id) kepada pencari kerja.

### **4. Sub Bagian Tata Usaha**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan setiap seksi-seksi untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

## BAB I - PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja UPT BP2MI Bandung pada tahun 2020. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan UPT BP2MI Bandung dan seluruh jajaran BP2MI dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

### B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, UPT BP2MI Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### 1. Tugas Pokok

UPT BP2MI Bandung diberikan tugas pokok yaitu "*Memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi*



*dengan Instansi baik Pemerintah Pusat maupun Daerah di wilayah Propinsi Jawa Barat”.*

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, UPT BP2MI Bandung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, Pengembangan Program dan Anggaran;
2. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Penyelenggaraan Pemasarakatan Program Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Pelayanan Penerbitan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (EKTKLN);
5. Pengumpulan data, Pembinaan Layanan Informasi serta Pembinaan Sistem dan Jaringan Informasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Pemberdayaan dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
7. Pelaksanaan Pemantauan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara Penempatan;
8. Pelaksanaan Pendaftaran dan Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia Penempatan oleh Pemerintah;
9. Monitoring Penyediaan dan Pelaksanaan Sertifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia;
10. Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Promosi;
11. Pelaksanaan Fasilitas Penyelesaian Masalah Pekerja Migran Indonesia;
12. Fasilitas Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
14. Penyusunan kelompok jabatan pengantar kerja;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

### C. ASPEK STRATEGIS

Berkaitan dengan pencapaian target RPJM Tahun 2020-2024, ditetapkan pokok-pokok **strategi UPT BP2MI Bandung** yang difokuskan pada :

1. Unit Pelayanan Publik yang sudah memenuhi standar pelayanan;
2. Pemanfaatan jobs info BP2MI dalam alur proses penempatan PMI;
3. Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2PMI;
4. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan melalui Crisis Center;
5. Fasilitasi Pelayanan Perlindungan PMI melalui Mediasi dan Advokasi;
6. Pemberdayaan PMI Purna dan Keluarganya.

### D. PERMASALAHAN UTAMA (*ISSUE STRATEGIS*)

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius antara dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia antara lain:

1. Hasil Pemetaan Potensi CPMI yang dilakukan oleh UPT BP2MI Bandung masih merupakan data mentah dan belum spesifik mengarah pada Peta CPMI.
2. Belum adanya potret daerah yang dapat digunakan dalam pembuatan model penyuluhan/sosialisasi.
3. Perlunya Bimbingan Teknis Petugas Penyuluh dalam rangka Peningkatan SDM.
4. Pemanfaatan Jobs Info masih belum sempurna, karena Petugas Jobs Info tidak dapat mengetahui berapa orang Jawa Barat yang telah mengakses ke Jobs Info.
5. Koneksi Jaringan (internet) yang tidak stabil mempengaruhi akses ke SISKOTKLN.
6. Realisasi Penempatan berbeda dengan realisasi PAP, karena PMI Cuti dan Re-Entry tidak mengikuti PAP sedangkan itu menjadi angka realisasi penempatan.
7. Permasalahan kasus terhadap PMI yang habis kontrak namun masih dipertahankan oleh majikan sedangkan keluarga dan PMI tersebut ingin pulang. UPT BP2MI Bandung sudah berkirin surat ke Kementerian Luar Negeri namun surat tersebut tidak ditanggapi.
8. Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan tidak ada anggaran monitoring walaupun lewat telepon tetapi tidak maksimal.
9. Tidak adanya anggaran untuk Identifikasi peserta Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan sehingga peserta yang diinginkan sesuai PERKA Badan tidak bisa dipenuhi.
10. Perlunya Bimbingan Teknis Evaluator Akuntabilitas Kinerja.



## **E. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disebut LAKIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil-hasil yang telah dicapai dan sebagai bentuk pertanggung-jawaban program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun agar diketahui oleh pimpinan dan masyarakat serta sebagai dasar dalam menentukan langkah yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dan hasil-hasilnya dari pelaksanaan program dan kegiatan UPT BP2MI Bandung yang tertib, teratur dan efisien untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

## **F. RUANG LINGKUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun oleh UPT BP2MI Bandung mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan khususnya tugas dan fungsi dalam lingkup pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Barat.

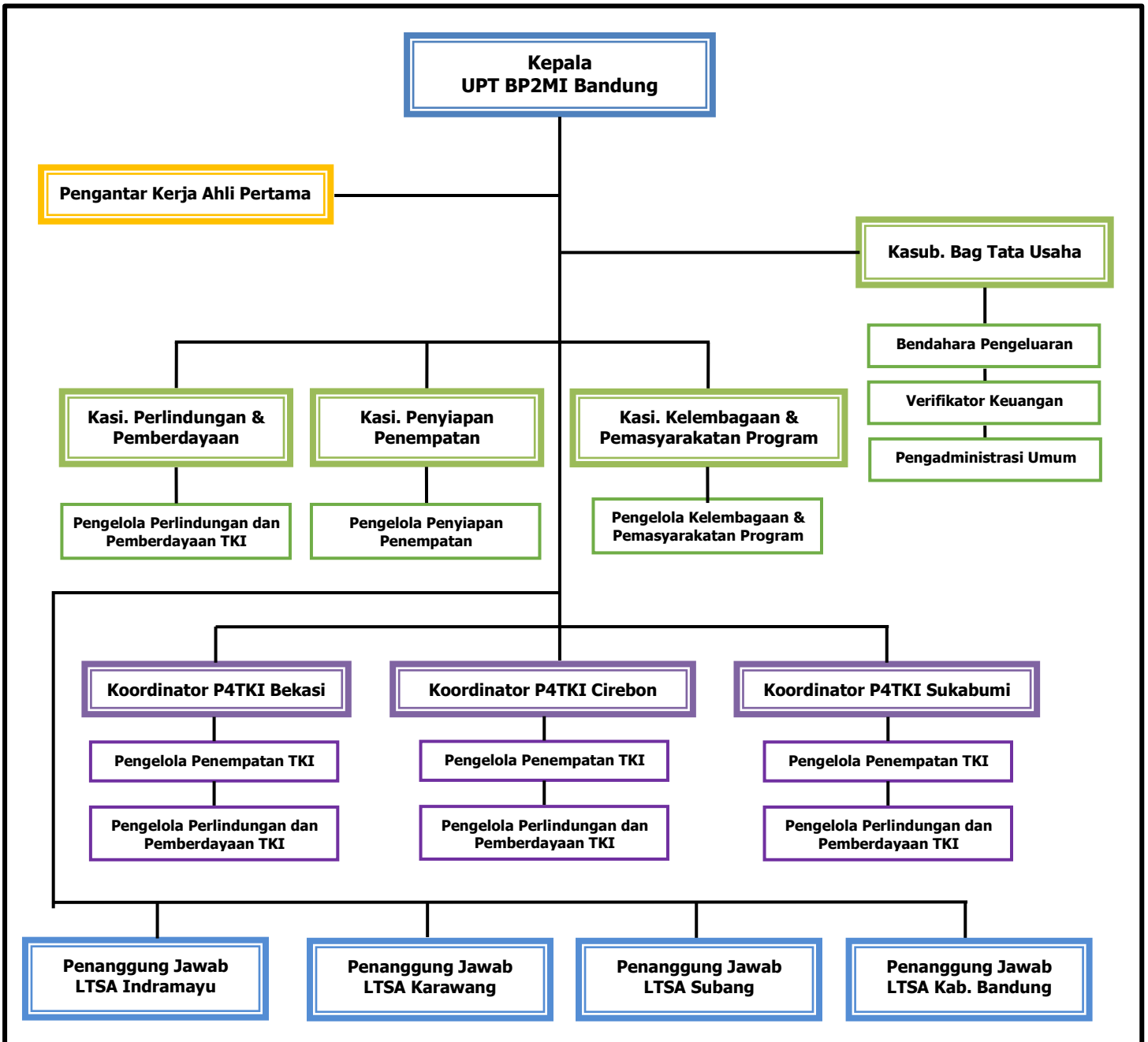
## **G. PERSONALIA DAN ORGANISASI**

### **1. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut UPT BP2MI Bandung memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



### STRUKTUR ORGANISASI UPT BP2MI BANDUNG



## 2. Jumlah Pegawai

UPT BP2MI Bandung pada tahun 2020 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 41 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**ASN UPT BP2MI Bandung Tahun 2020**  
**(Sesuai Penempatan)**

No	Seksi/Jabatan	Jenis Kelamin			Pangkat/ Gol				Jab	
		L	P	JML	I	II	III	IV	S	NS
1	Kepala UPT	1	-	1	-	-	-	1	1	-
2	Fungsional	3	1	4	-	-	4	-	-	4
3	Sub. Bagian Tata Usaha	4	2	6	1	-	5	-	1	5
4	Seksi Penyiapan Penempatan	3	3	6	-	-	6	-	1	5
5	Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan	3	4	7	-	-	7	-	1	6
6	Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program	1	2	3	-	-	3	-	1	2
7	P4TKI Bekasi	1	5	6	-	-	6	-	-	6
8	P4TKI Cirebon	-	2	2	-	-	2	-	-	2
9	P4TKI Sukabumi	1	-	1	-	-	1	-	-	1
10	LTSA Indramayu	-	1	1	-	-	1	-	-	1
11	LTSA Karawang	1	1	2	-	-	2	-	-	2
12	LTSA Subang	1	-	1	1	-	-	-	-	1
13	LTSA Kab. Bandung	-	1	1	-	-	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>36</b>

## H. DASAR PELAKSANAAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT BP2MI Bandung Tahun 2020 didasarkan pada Rencana Strategis UPT BP2MI Bandung Tahun 2015-2019 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI);
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015;
  7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden R.I. Nomor 165 Tahun 2015 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara R.I. Tahun 2015 Nomor 339);
  9. Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  11. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI;
  12. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01/KA/-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10/KA/IV/2012 tanggal 20 April 2012;
  14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  15. Keputusan Kepala UPT BP2MI Bandung Nomor KEP.11/BP3TKI-6/I/2020 tentang Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020;
  16. Keputusan Kepala UPT BP2MI Bandung Nomor KEP.11A/BP3TKI-6/I/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama UPT BP2MI Bandung Tahun 2020.

## I. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT BP2MI Bandung Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, aspek strategis, permasalahan utama (*issue* strategis), maksud dan tujuan, ruang lingkup, organisasi dan personalia, dasar pelaksanaan dan sistematika penyajian.

### **Bab II – Perencanaan Kinerja,**

- A. Menjelaskan Rencana Strategis UPT BP2MI Bandung yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, Target Kinerja tahun 2018, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan;
- B. Menjelaskan Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020**, menjelaskan pengelolaan kinerja berupa

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).



## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, UPT BP2MI Bandung berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis UPT BP2MI Bandung 2020 – 2024, Program dan Kegiatan dan Perjanjian Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung tahun 2020.

### A. RENCANA STRATEGIS UPT BP2MI BANDUNG 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) UPT BP2MI Bandung 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah UPT BP2MI Bandung yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh UPT BP2MI Bandung beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra UPT BP2MI Bandung telah mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Perekonomian. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah UPT BP2MI Bandung maupun *stakeholder* eksternal. Laporan Kinerja ini masih mengacu Renstra Tahun 2020-2014 tetapi beberapa Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama masih mengacu kepada Renstra Tahun 2015-2019 Secara ringkas substansi UPT BP2MI Bandung dapat diilustrasikan sebagai berikut :

#### 1. Visi

Visi UPT BP2MI Bandung yang diharapkan memberi arah ke masa depan yaitu :

**Terwujudnya Tenaga Kerja Indonesia yang Berkualitas dan Bermartabat di wilayah Provinsi Jawa Barat**

## 2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, UPT BP2MI Bandung menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- 0 Zero TKI Informal**, Seluruh TKI yang dikirimkan ke LN berstatus tercatat sebagai TKI dan dipekerjakan pada sektor formal. Target juga mencakup beralihnya seluruh TKI ilegal yang dipersiapkan kembali menjadi TKI legal pada sektor formal;
- 1 Pra Keberangkatan TKI rata-rata 1 Bulan**, Tersedianya layanan yang cepat dan mudah sejak pengurusan administrasi, pembekalan TKI, persiapan keberangkatan hingga keberangkatan TKI menuju negara penempatan;
- 2 Dua bulan gaji biaya maksimal TKI**, Meminimalkan biaya persiapan dan pemberangkatan yang menjadi beban TKI sehingga menjadi sebesar-besarnya 2 bulan gaji TKI bersangkutan;
- 3 Remitansi TKI Meningkat 3 kali lipat**, Meningkatkan nilai pengiriman uang TKI dari negara penempatan menjadi 3 x lipat dari nilai saat ini sebesar Rp. 70 Triliun/Tahun;
- 4 Perlindungan utuh di 4 (empat) Tahapan**, TKI mendapatkan jaminan dan akses perlindungan sejak di tahap pra-keberangkatan, masa bekerja, kepulangan hingga tahap pemberdayaan;
- 5 TKI Purna jalani 5 solusi mandiri**, TKI yang kembali ke tanah air mendapatkan beragam fasilitas dan layanan berupa (i) pelatihan, (ii) dukungan finansial, dan (iii) pendampingan usaha, untuk menjadikannya sebagai wirausaha mandiri serta (iv) pelatihan dan (v) lapangan pekerjaan bagi yang akan bekerja di perusahaan.

## 3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, UPT BP2MI Bandung menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2024 yaitu:

**Tabel 2**  
**Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan UPT BP2MI Bandung**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa	Persentase PMI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditempatkan
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel	Persentase laporan rutin yang berbasis web secara tepat waktu
	Nilai AKIP UPT BP2MI

#### 4. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan atas tujuan tersebut, selanjutnya UPT BP2MI Bandung akan menjabarkan dalam sasaran-sasaran program/kegiatan (Sasaran Strategis) yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Program/Kegiatan dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja UPT BP2MI Bandung**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>Tujuan 1 : <i>Terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa</i></b>	
Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN
Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional
Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan
Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah
Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/ PMI
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen
	Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangk an usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan
	Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha
	Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya
Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal
<b>Tujuan 2 : Terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel</b>	
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel
	Nilai AKIP
Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)

## 5. Target Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Rencana Strategis UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024, target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Target Kinerja UPT BP2MI Bandung**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI	6.000 orang
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	6 lokasi
Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional	32.000 PMI
Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	90%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah	1.000 PMI
Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	30%
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	10%
	Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural	90%
Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembang kan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	350 orang
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	30 orang
	Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha	32%
	Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI	792 PMI
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	10%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	30 orang
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 bulan
	Nilai AKIP	86
Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	75%

## 6. Arah Kebijakan dan Strategi

Penyusunan Rencana Strategis sejauh mungkin telah diupayakan dapat mengakomodasikan kebutuhan *stakeholders*, baik internal BP3TKI maupun instansi lain atau masyarakat umum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Arah kebijakan yang akan dilakukan UPT BP2MI Bandung dalam mendukung terciptanya *clean government dan good governance* sebagaimana matrik berikut ini :

**Tabel 5**  
**Arah Kebijakan Dan Strategi UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024**

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	a. Melakukan edukasi, propaganda, dan sosialisasi secara masif untuk memerangi <i>human trafficking</i> b. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural c. Monitoring di penampungan P3MI dan Lembaga Pendukung Penempatan serta di debarkasi dan embarkasi d. Penguatan pengawasan P3MI, dengan cara memberikan peringatan serta rekomendasi skorsing dan pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) e. Simplifikasi proses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, cepat dan transparan f. Meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen g. Meningkatkan koordinasi dan peran daerah hingga ke desa dalam melakukan upaya bersama meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen h. Meningkatkan dan menambah jumlah paralegal yang ada di daerah hingga ke desa
Menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai <i>Very Very Important Person (VVIP)</i>	a. Memaksimalkan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya b. Penguatan <i>help desk &amp; lounge</i> di bandara dan pelabuhan laut melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait c. Pengawasan jaminan sosial <i>Cost Structure</i>
Peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	a. Meningkatkan kompetensi/kapasitas Pekerja Migran Indonesia b. Pemetaan <i>demand</i> pasar kerja dan <i>supply</i> yang ditindaklanjuti dengan harmonisasi c. Sosialisasi dan diseminasi informasi peluang kerja terampil dan profesional di luar negeri d. Penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia ( <i>G to G, G to P, P to P, UKPS, dan Mandiri</i> termasuk <i>SP2T, SSW</i> dan <i>SPSK</i> )
Penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia <i>low skilled</i> beresiko tinggi	a. Mengarahkan penempatan Pekerja Migran Indonesia <i>low skilled</i> ke negara tujuan penempatan yang memiliki hukum ketenagakerjaan b. Meningkatkan kampanye penyadaran publik untuk pilihan bekerja di luar negeri c. Memonitor penetapan standar minimum yang layak, upah dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia di luar negeri d. Menyederhanakan alur proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Tata kelola Pekerja Migran Indonesia <i>sea-based</i> (awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran)	Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait
Pembebasan biaya penempatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyebarluasan peraturan BP2MI mengenai pembebasan biaya penempatan</li> <li>b. Memperluas sarana kesehatan di kantong Pekerja Migran Indonesia</li> <li>c. Meningkatkan koordinasi dengan negara penempatan, Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Republik Indonesia dan <i>stakeholders</i> terkait</li> </ul>
Peningkatan Purna Pekerja Migran Indonesia produktif dan reintegrasi sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas usaha PMI dan keluarga melalui kegiatan edukasi yang dibutuhkan oleh PMI Purna dan keluarga yang sudah dilatih</li> <li>b. Kegiatan pemberdayaan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui edukasi keuangan, kewirausahaan, dan kegiatan produktif</li> <li>c. Memperkuat kapasitas masing-masing CO dari Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) yang sudah di bentuk dan memperluas program Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM)</li> </ul>
Peningkatan sinergi dan koordinasi <i>multi-stakeholder</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Integrasi sistem pendataan Pekerja Migran Indonesia, data tunggal, terpadu-terintegrasi (SIDABIT – Sistem Data Tunggal Terpadu Terintegrasi)</li> <li>b. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia</li> <li>c. Mengharmonisasikan kebijakan dan standar pelayanan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan <i>stakeholders</i> terkait</li> </ul>
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan kelembagaan, serta Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah sebagai kepanjangan tangan BP2MI untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia</li> <li>b. Penguatan kelembagaan (program dan anggaran)</li> <li>c. Penguatan kapasitas dan infrastruktur SDM</li> <li>d. Pengembangan sarana dan prasarana</li> <li>e. Peningkatan citra BP2MI (<i>image building/branding</i>)</li> <li>f. Pengembangan sistem informasi</li> <li>g. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> <li>h. Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>i. Penyelarasan regulasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia</li> <li>j. Peningkatan pengendalian dan pembinaan akuntabilitas BP2MI</li> </ul>

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

UPT BP2MI Bandung melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan BNP2TKI secara keseluruhan yaitu Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT BP2MI Bandung adalah sebagai berikut :

### a. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program.

Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program, bertanggung jawab pada Sasaran Program/kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 6**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja**  
**Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program Tahun 2020**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI	6.000 orang
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	6 lokasi
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN UPT BP2MI BANDUNG Rp. 330.760.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</b>		

### b. Seksi Penyiapan Penempatan

Seksi Penyiapan Penempatan, bertanggungjawab pada Sasaran Program/ kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 7**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja**  
**Seksi Penyiapan Penempatan Tahun 2020**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional	32.000 PMI
Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	90%
Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah	1.000 PMI
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN UPT BP2MI BANDUNG Rp. 1.485.262.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</b>		

### c. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, bertanggungjawab pada Sasaran Program/kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 8**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja**  
**Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Tahun 2020**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	30%
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	10%
	Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural	90%
Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembang kan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	350 orang
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	30 orang
	Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha	32%
	Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI	792 PMI
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	10%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	30 orang
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN UPT BP2MI BANDUNG Rp. 27.685.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</b>		

### d. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha, bertanggungjawab pada Sasaran Program/ kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 9**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja**  
**Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2020**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 bulan
	Nilai AKIP	86
Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	75%
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN UPT BP2MI BANDUNG Rp. 9.033.076.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</b>		

### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE:/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujudnya nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

UPT BP2MI Bandung telah membuat penetapan kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra UPT BP2MI Bandung tahun 2020 – 2024. Penetapan Kinerja tingkat UPT BP2MI Bandung Tahun 2020 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

#### 1. Rencana Kinerja Tahunan UPT BP2MI Bandung Renstra Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UPT BP2MI Bandung tahun 2020 mengacu pada Renstra UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024 sebagaimana Keputusan Kepala UPT BP2MI Bandung Nomor.KEP.46/BP3TKI-6/VII/2020, sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**UPT BP2MI Bandung Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI	6.000 orang
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	6 lokasi
Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional	32.000 PMI
Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	90%
Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah	1.000 PMI
Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	30%
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	10%
	Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural	90%
Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangk an usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	350 orang
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	30 orang
	Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha	32%
	Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI	792 PMI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	10%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	30 orang
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 bulan
	Nilai AKIP	86
Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	75%

## 2. Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020

Untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan UPT BP2MI Bandung Tahun 2020, telah dibuat Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020 sesuai Peraturan UPT BP2MI Bandung Nomor : KEP.48/BP3TKI-6/VII/2020 tentang Perubahan Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020. Adapun Penetapan Kinerja Kepala UPT BP2MI Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI	6.000 orang
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	6 lokasi
Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional	32.000 PMI
Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	90%
Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah	1.000 PMI

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	30%
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	10%
	Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural	90%
Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembang kan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	350 orang
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	30 orang
	Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha	32%
	Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI	792 PMI
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	10%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	30 orang
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 bulan
	Nilai AKIP	86
Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	75%
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN UPT BP2MI BANDUNG Rp. 11.011.909.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI</b>		

Karena adanya pencermatan, reconfusing dan penghematan Tahun 2020, maka terjadi perubahan target pada Penetapan Kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 12**  
**Reviu Target Penetapan Kinerja UPT BP2MI Bandung**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI	6.000 orang
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	8 lokasi
Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional	32.000 PMI
Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	90%
Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah	1.000 PMI
Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	30%
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	10%
	Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural	90%
Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangk an usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	350 orang
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	30 orang
	Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha	32%
	Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI	792 PMI
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	10%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	30 orang
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 bulan
	Nilai AKIP	86



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	75%
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN UPT BP2MI BANDUNG Rp. 10.876.783.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI</b>		

## BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGELOLAAN KINERJA

#### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja serta Analisis capaian kinerja merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program UPT BP2MI Bandung.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada UPT BP2MI Bandung menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Kategori Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020**

No.	Kategori	RentangNilai	Kode
1.	SangatBaik	> 100	Biru
2.	Baik	80 – 100	Hijau
3.	Cukup	50 – 79	Kuning
4.	Kurang	< 49	Merah

Proses penghitungan kinerja menggunakan Informasi Indikator Kinerja (IIK) yang telah ditetapkan sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

#### 2. Pengukuran Capaian Kinerja

Penilaian kinerja pada UPT BP2MI Bandung dilakukan selama 1 tahun. Secara rinci hasil penilaian kinerja UPT BP2MI Bandung sebagaimana tabel berikut ini:



**Tabel 14**  
**Pengukuran Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020**  
**(Per Triwulan)**

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	
Kementerian/Lembaga	: BNP2TKI
Unit Kerja	: UPT BP2MI Bandung
Pagu Anggaran	: Rp. 10.876.783.000,-, Realisasi Anggaran : Rp. 10.728.735.778,- atau 98,64%
Program	: Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI	6.000	1.500	257	1.500	0	1.500	347	1.500	1.381
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	8 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	6 lokasi	6 lokasi
Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional	32.000 PMI	8.000 PMI	1.985 PMI	8.000 PMI	0	8.000 PMI	89 PMI	8.000 PMI	641 PMI
Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	90%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%
Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah	1.000 PMI	250 PMI	188 PMI	250 PMI	0	250 PMI	0	250 PMI	0
Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	25%	66,25%	25%	18,75%	25%	34,50%	25%	46,25%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	30%	7,5%	0,37%	7,5%	4,68%	7,5%	8,63%	7,5%	11,56%
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	25%	2,26%	25%	5,33%	25%	5,79%	25%	2,70%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	10%	2,5%	0%	2,5%	0%	2,5%	0%	25%	0%



Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural	<b>90%</b>	22,5%	21,47%	22,5%	0%	22,5%	2,82%	22,5%	17,33%
Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembang kan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	<b>350 orang</b>	88 orang	0	88 orang	0	87 orang	0	87 orang	0
	Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	<b>30 orang</b>	8 orang	0	8 orang	0	7 orang	0	7 orang	0
	Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha	<b>32%</b>	8%	0%	8%	0%	8%	0%	8%	0%
	Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI	<b>792 PMI</b>	198 orang	0	198 orang	0	198 orang	0	300	0
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	<b>10%</b>	2,5%	0%	2,5%	0%	2,5%	0%	2,5%	0%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	<b>30 orang</b>	8 orang	1	8 orang	0	7 orang	5 orang	7 orang	17 orang
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	<b>12 bulan</b>	3 Bulan	3 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
	Nilai AKIP	<b>86</b>	86	88,03	86	88,03	86	88,03	86	88,03
Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	<b>75%</b>	75%	50%	75%	50%	75%	50%	100%	50%



**Tabel 15**  
**Pengukuran Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020**

<b>PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020</b>	
Kementerian/Lembaga	: BNP2TKI
Unit Kerja	: UPT BP2MI Bandung
Pagu Anggaran	: Rp. 10.876.783.000,-, Realisasi Anggaran : Rp. 10.728.735.778,- atau 98,64%
Program	: Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran (Dalam Rupiah)		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI	<b>6.000</b>	1.985	<b>33,08</b>	330.760.000	327.890.728	99,13
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	<b>8 lokasi</b>	8 lokasi	<b>100</b>			
Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional	<b>32.000 PMI</b>	731 PMI	<b>2,28</b>	1.485.262.000	1.416.993.651	95,40
Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	<b>90%</b>	100%	<b>111,11</b>			
Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah	<b>1.000 PMI</b>	188 PMI	<b>18,8</b>			
Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Presentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	<b>100%</b>	165,75%	<b>165,75</b>	-	-	0
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	<b>30%</b>	41,44%	<b>138,13</b>	16.260.000	15.379.000	94,58
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	<b>100%</b>	3,47%	<b>3,47</b>			
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	<b>10%</b>	0%	<b>0%</b>			



Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran (Dalam Rupiah)		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural	<b>90%</b>	60,70%	<b>67,44</b>			
Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangk an usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	<b>350 orang</b>	0 orang	<b>0</b>	-	-	0
	Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	<b>30 orang</b>	0 orang	<b>0</b>			
	Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha	<b>32%</b>	0%	<b>0</b>			
	Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI	<b>792 PMI</b>	0 PMI	<b>0</b>			
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	<b>10%</b>	0%	<b>0</b>			
Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	<b>30 orang</b>	22 orang	<b>73,33</b>	11.425.000	11.408.000	99,85
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	<b>12 bulan</b>	12 bulan	<b>100</b>	606.101.000	597.989.967	98,66
	Nilai AKIP	<b>86</b>	88,03	<b>102,36</b>			
Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	<b>75%</b>	50%	<b>66,67</b>	8.426.975.000	8.359.074.432	99,19

## B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam pelaksanaannya Evaluasi Capaian Kinerja pada UPT BP2MI Bandung menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja. Secara rinci hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran UPT BP2MI Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Hasil Evaluasi Capaian Kinerja UPT BP2MI Bandung Tahun 2020**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	%
Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI	<b>6.000</b>	1.985	<b>33,08</b>
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	<b>8 lokasi</b>	8 lokasi	<b>100</b>
Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional	<b>32.000 PMI</b>	731 PMI	<b>2,28</b>
Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	<b>90%</b>	100%	<b>111,11</b>
Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah	<b>1.000 PMI</b>	188 PMI	<b>18,8</b>
Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	<b>100%</b>	165,75%	<b>165,75</b>
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	<b>30%</b>	41,44%	<b>138,13</b>
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	<b>100%</b>	3,47%	<b>3,47</b>
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	<b>10%</b>	0%	<b>0%</b>
	Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural	<b>90%</b>	60,70%	<b>67,44</b>



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	%
Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembang kan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	<b>350 orang</b>	0 orang	<b>0</b>
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	<b>30 orang</b>	0 orang	<b>0</b>
	Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha	<b>32%</b>	0%	<b>0</b>
	Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas	<b>792 PMI</b>	0 PMI	<b>0</b>
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	<b>10%</b>	0%	<b>0</b>
Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	<b>30 orang</b>	22 orang	<b>73,33</b>
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	<b>12 bulan</b>	12 bulan	<b>100</b>
	Nilai AKIP	<b>86</b>	88,03	<b>102,36</b>
Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	<b>75%</b>	50%	<b>66,67</b>

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Untuk melakukan Analisis Capaian Kinerja pada UPT BP2MI Bandung dilakukan membandingkan target sasaran strategis dengan realisasinya akan didapat persentasi naik atau turun. Adapun Analisis Capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesatu Tersedianya Peta Potensi CPMI

**Tabel 17**  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesatu Tahun 2019 dan 2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah Potensi CPMI	<b>8.000</b>	6.151	<b>76,89</b>	6.000	1.985	<b>33,08</b>

- **Jumlah Potensi CPMI**

Jumlah target potensi CPMI dari Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kab/Kota sebanyak sebanyak 6.000 orang. Dari laporan 27 Kab/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang diperoleh dari lembaga pendidikan (SMK Kejuruan, Akademi Kebidanan, Poltekkes), Lembaga Pelatihan dan Balai Latihan Kerja, peminat kerja ke Luar Negeri, pencaker yang datang ke UPT BP2MI Bandung serta Alumni Sekolah Keperawatan yang berminat bekerja sebagai perawat di Kuwait diperoleh data potensi CPMI Tahun 2020 sebanyak 1.985 orang CPMI atau 33,08%. Jumlah Potensi pencari kerja yang datang ke Kantor UPT BP2MI Bandung pada Tahun 2020 berjumlah 635 CPMI. Jumlah Potensi yang didapatkan dari kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman pada Tahun 2020 sebanyak 1.350 CPMI. Kegiatan pelayanan di kantor UPT BP2MI Bandung mulai diberlakukan kembali tetapi pelayanan dilaksanakan secara terbatas terkait pelaksanaan Sistem Kerja *Work From Home (WFH)* dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga jumlah potensi CPMI masih rendah.

Pencari Kerja yang datang ke Kantor UPT BP2MI Bandung diberikan informasi sumber lowongan pekerjaan yaitu website Jobsinfo sehingga Pencari Kerja dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Namun, kendala ada pada saat pengisian data diri karena banyak data yang diinput sehingga memperlambat pelayanan. Oleh karena itu pencaker hanya diberikan informasi langkah-langkah jika ingin mendaftar secara mandiri di rumah. Adapun sosialisasi Jobs info selama ini belum efektif karena hanya melalui tatap muka langsung di Kantor UPT BP2MI Bandung, *Running Text* di depan Kantor UPT BP2MI Bandung dan melalui brosur kepada peserta sosialisasi sehingga menyebabkan kurang tersosialisasinya layanan Jobs Info di kalangan pencari kerja.

Sebagian besar dari pencari kerja menanyakan terkait kapan pembukaan negara penempatan, khususnya untuk wilayah ASPAC, namun untuk saat ini masih belum ada negara penempatan yang telah membuka penempatan. Pada akhir Juli 2020 telah dilaksanakan *Press Conference* dari Kemenaker bersama dengan BP2MI yang membuka penempatan di berbagai negara, namun peraturan turunannya belum disebarluaskan sehingga layanan penempatan masih tetap belum dilaksanakan.

## 2. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedua Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan PMI Non Prosedural

Tabel 18  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua  
Tahun 2019 dan 2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	9 Kab/ Kota	9 Kab/Kota	100	8 Lokasi	8 Lokasi	100

### • Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN

Target jumlah lokasi Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman dengan narasumber setara Menteri adalah 8 lokasi. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman yaitu di :

1. Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi pada tanggal 21 September 2020
2. Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada tanggal 23 September 2020
3. Kec. Plered Kab. Purwakarta pada tanggal 14 Oktober 2020
4. Kec. Baleendah, Kab. Bandung pada tanggal 20 Oktober
5. Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi pada tanggal 22 Oktober 2020
6. Kab. Bandung Barat pada tanggal 22 Oktober 2020
7. Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi pada tanggal 23 Oktober 2020
8. Kec. Kebon Pedes Kab. Sukabumi pada tanggal 30 November 2020

## 3. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Ketiga Meningkatnya Penempatan PMI terampil dan profesional

Tabel 19  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketiga  
Tahun 2019 dan 2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Penempatan PMI terampil dan profesional	20.000 PMI	10.031 PMI	50,16	32.000 PMI	731 PMI	2,28

### • Penempatan PMI terampil dan profesional

Terdapat perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024. Jumlah target penempatan PMI terampil dan profesional

pada tahun 2020 yaitu sejumlah 32.000 PMI. Sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 731 PMI atau sebesar 2,28%. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, baru 12 negara tujuan penempatan yang dibuka kembali bagi penempatan PMI, sehingga berpengaruh besar terhadap pencapaian target penempatan PMI terampil dan profesional.

#### 4. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Keempat Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI

**Tabel 20**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keempat**  
**Tahun 2019 dan 2020**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	100%	90,18%	<b>90,18</b>	90%	100%	<b>111,1</b>

- **Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan**

Peningkatan target persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan dikarenakan indikator penilaian kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku menggunakan data kasus/pengaduan dari CPMI/PMI/keluarganya yang terdata di Crisis Center BP2MI.

Sepanjang tahun 2020, jumlah P3MI di wilayah kerja Jawa Barat sebanyak 85 P3MI. Sehingga prosentase target di setiap triwulannya tetap yaitu 90% dari jumlah P3MI. Terdapat sebanyak 85 P3MI mematuhi standar pelayanan atau 100%. Berdasarkan data pengaduan PMI pada tahun 2020 tidak terdapat P3MI yang pernah terlibat kasus dan mendapat teguran/hukuman dari BP2MI.

Kasus P3MI seringkali dibiarkan berlarut-larut sehingga penyelesaian kasus yang terjadi di P3MI cenderung lama. Saat ini tools yang dimiliki baru *tools* untuk menilai LPK. Belum adanya tools untuk menilai kepatuhan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk melakukan penilaian kepatuhan Lembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan secara menyeluruh di

UPT BP2MI Bandung. Saat ini kepatuhan dilihat dari keaktifan dalam berkoordinasi dengan UPT BP2MI Bandung. Belum sebandingnya antara alokasi anggaran pembinaan dengan jumlah Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan di wilayah kerja Jawa Barat menyebabkan Koordinasi lebih banyak dilakukan melalui surat dan telepon.

## 5. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kelima Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah

Tabel 21  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kelima  
Tahun 2019 dan 2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
PMI yang ditempatkan pemerintah	-	-	-	1.000 PMI	188 PMI	<b>18,8</b>

### • PMI yang ditempatkan pemerintah

PMI yang ditempatkan pemerintah merupakan pelayanan *G to G* Korea Selatan. Pada tahun 2019 belum ada indikator terkait pelayanan *G to G* Korea Selatan sehingga target dan realisasi masih nihil. Jumlah target fisik pelayanan pemerintah tahun anggaran 2020 adalah 1.000 PMI. Sedangkan realisasinya sebesar 188 PMI atau 18,8%. Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, seluruh kegiatan pelayanan penempatan PMI di Kantor UPT BP2MI Jawa Barat untuk sempat diberhentikan dikarenakan situasi Pandemi COVID-19, sehingga jumlah pelayanan penempatan masih rendah.

## 6. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Keenam Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses dan diselesaikan

Tabel 22  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keenam  
Tahun 2019 dan 2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	173,75%	<b>173,75</b>	100%	165,75%	<b>165,75</b>

### • Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI

UPT BP2MI Bandung melayani pengaduan secara langsung (tatap muka) maupun yang berupa surat tembusan. Hingga saat ini baik UPT BP2MI Bandung, P4TKI Cirebon, P4TKI Sukabumi, LTSP Indramayu dan PTSP Karawang selalu menindaklanjuti semua pengaduan yang masuk dan berkoordinasi BP2MI (Pusat) maupun dengan Perwakilan RI yang berada di Negara Penempatan. Target jumlah pengaduan tahun 2020 sebesar 400 kasus, sedangkan jumlah realisasi 663 kasus atau sebesar 165,75%. Terdiri dari 640 kasus berupa surat masuk dan 23 kasus berupa pengaduan langsung (tatap muka).

## 7. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Ketujuh Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, Masa dan Purna PMI

**Tabel 23**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketujuh**  
**Tahun 2019 dan 2020**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	10%	11,31%	<b>113,1</b>	30%	41,44%	<b>138,13</b>
Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	5,32%	<b>5,32</b>	100%	3,47%	<b>3,47</b>

- **Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI**

Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI terjadi dikarenakan UPT BP2MI Bandung selalu berupaya menindaklanjuti permasalahan CPMI/PMI dengan memanggil para pihak untuk di mediasi dalam rangka pemenuhan hak PMI. Semakin tertatanya proses penempatan dan perlindungan PMI sehingga permasalahan-permasalahan PMI di Luar Negeri menjadi berkurang.

- **Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum**

UPT BP2MI Bandung melayani setiap pengaduan langsung yang datang ke UPT BP2MI Bandung. BP3TKI juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk setiap perkara yang membutuhkan bantuan hukum. Di tahun 2020 ini jumlah pengaduan langsung ke UPT BP2MI Bandung sebesar 23 kasus atau 3,47% dari target sebesar 663 kasus.

## 8. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedelapan

### Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan

**Tabel 24**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedelapan**  
**Tahun 2019 dan 2020**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%	0%	<b>0</b>	10%	0%	<b>0</b>
Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural	100%	133,46%	<b>133,46</b>	90%	60,70%	<b>67,44</b>

- **Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen**  
Capaian persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen masih 0% dikarenakan UPT BP2MI Bandung belum memiliki unit intelejen untuk mendukung penyelesaian masalah PMI.

- **Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural**

UPT BP2MI Bandung hanya akan memberangkatkan CPMI ke Negara Penempatan yang sudah mengikuti prosedur yang sesuai dan berdokumen lengkap sesuai ketentuan berlaku seperti sudah mendapatkan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan diterbitkannya E-KTKLN di UPT BP2MI Bandung, P4TKI Bekasi, P4TKI Cirebon, P4TKI Sukabumi, LTSP Indramayu dan PTSP Karawang. Selain itu, UPT BP2MI Bandung juga melakukan sosialisasi untuk menjadi PMI yang legal di kantong-kantong TKI Non Prosedural. Dari jumlah target 32.000 PMI tercapai 12.138 orang PMI atau sebesar 60,70%. Kegiatan Pelayanan di Kantor UPT BP2MI Bandung mulai diberlakukan kembali tetapi pelayanan dilaksanakan secara terbatas terkait Pelaksanaan Sistem Kerja *Work From Home (WFH)* dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga jumlah persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural masih rendah.

## 9. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesembilan Meningkatnya kemampuan PMI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro

Tabel 25  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesembilan  
Tahun 2019 dan 2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	900	0	0	350 orang	0 orang	0
Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50	0	0	30 orang	0 orang	0
Persentase PMI Purna yang menjadi Wirausaha	40%	0%	0	32%	0%	0
Jumlah PMI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI	1.200	0	0	792 PMI	0 PMI	0
Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/ Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	100%	0%	0	10%	0%	0

- **Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha**

Jumlah target pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha tahun 2020 sebanyak 350 orang. Seharusnya target pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha berjumlah 3.000 orang. Adapun revisi jumlah target dikarenakan dalam anggaran untuk kegiatan kewirausahaan hanya dilaksanakan kegiatan yang regular masih belum terdapat anggaran tambahan (APBNP) untuk kegiatan kewirausahaan. Realisasi pada tahun 2020 masih 0 dikarenakan pada tahun ini tidak ada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan PMI Purna yang diselenggarakan oleh UPT BP2MI Bandung. Adapun penyebab ditiadakannya kegiatan tersebut dikarenakan adanya perubahan skema pelatihan kewirausahaan, dimana program akan diatur oleh pusat baik kegiatan maupun anggaran dananya.

- **Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan**

Capaian pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan tahun 2020 masih sebesar 0% dikarenakan tidak terdapat anggaran

pelatihan kewirausahaan dalam POK UPT BP2MI Bandung sehingga kegiatan pemberdayaan tidak dilaksanakan.

- **Persentase PMI Purna yang menjadi Wirausaha**

Jumlah persentase PMI Purna yang menjadi wirausaha tahun 2020 sebanyak 0 dari total target 400 orang karena tidak terselenggaranya kegiatan pelatihan kewirausahaan. Upaya dari UPT BP2MI Bandung dalam mengarahkan PMI Purna agar menjadi Wirausaha salah satunya dengan memonitor para peserta setelah mendapatkan program pemberdayaan (pelatihan). Namun pasca kegiatan edukasi, tidak semua peserta bisa menerapkan ilmu yang diperoleh.

- **Jumlah PMI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI**

Pada tahun 2020 jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI masih sebesar 0% karena UPT BP2MI Bandung tidak meluncurkan Kampung PMI dikarenakan adanya penghematan/pemotongan anggaran.

- **Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/ Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya**

Jumlah persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya masih sebesar 0% karena UPT BP2MI Bandung belum melakukan fasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya.

## 10. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesepuluh Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI bermasalah

Tabel 26  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesepuluh  
Tahun 2019 dan 2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	50	48	96	30 orang	22 orang	73,33

- **Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal**

UPT BP2MI Bandung memiliki Pos Pelayanan Pendataan Kepulangan dan Keberangkatan PMI di Debarkasi Embarkasi Bandara Husein Sastranegara Bandung



yang selalu melakukan pendataan PMI yang keputingannya bermasalah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kedutaan/Perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya. Jumlah target fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal tahun 2020 sebanyak 30 orang.

Pelayanan Pelayanan Pemulangan PMI Ilegal/Bermasalah bisa dilakukan di Pos Pelayanan BP3TKI Bandung yang berada di Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Kertajati Majalengka. Untuk Tahun 2020, tercatat ada 22 orang PMI-B yang difasilitasi keputingannya. 1 orang PMI-B dilakukan pendampingan keputingannya PMI yang lolos hukuman mati di Arab Saudi dari Bandara Soekarno Hatta ke rumahnya di Majalengka. 1 orang PMI-B dilakukan penjemputan PMI-B dari terminal bus ke Gugus Tugas Covid-19 BPSDM Jawa Barat. Kemudian, terdapat 2 orang PMI B yang difasilitasi keputingannya melalui Bandara Husein Sastranegara Bandung dan dilakukan sistem penggantian anggaran (*reimburse*) oleh Subdirektorat Pelayanan Keputingannya BP2MI karena UPT BP2MI Wilayah Bandung – Jawa Barat sudah tidak lagi terdapat anggaran pemulangan. Lalu, terdapat pula 1 orang PMI-B renta yang dibantu fasilitasi keputingannya dari UPT BP2MI Wilayah Tanjung Pinang – Kepulauan Riau menuju asal di Cirebon dengan berkoordinasi dengan UPT BP2MI Wilayah Tanjung Pinang – Kepulauan Riau, UPT BP2MI Wilayah Serang – Banten, dan P4TKI Cirebon untuk memfasilitasi keputingannya PMI-B ke alamat di asal. Kemudian, 1 orang merupakan PMI-B yang pulang melalui Bandara Soekarno Hatta, namun sebelum tiba di rumahnya di Cianjur, UPT Wilayah Bandung – Jawa Barat memfasilitasi PMI untuk membuat laporan ke Polda Jabar terkait dugaan TPPO yang dialaminya. Selain itu, terdapat 1 orang PMI-B lain yang difasilitasi keputingannya melalui bandara Husein Sastranegara Bandung dari UPT BP2MI Tanjung Pinang, yang kemudian dijemput oleh keluarga untuk pulang ke rumahnya di Bekasi. Kemudian, 1 orang ABK pulang ke rumahnya di Majalengka, sembari menunggu proses penyelesaian sisa gaji belum dibayar. 2 orang dilakukan penjemputan di Wisma Atlet Jakarta setelah PMI menjalani karantina selepas mereka kembali ke Indonesia. Kemudian, 1 orang lagi merupakan pemulangan PMI-B yang sudah 10 tahun tidak pulang, difasilitasi oleh BP2MI Serang dan hasil koordinasi dengan Disnaker KBB, LTSA Kab. Bandung, dan UPT BP2MI Wilayah Bandung – Jawa Barat. Selain itu, sejak Agustus 2020 hingga saat ini, terdapat 11 orang PMI-B yang merupakan ABK yang dibantu difasilitasi dalam bentuk akomodasi, konsumsi, serta keputingannya mereka ke daerah asal.

**11. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesebelas**  
**Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan**

**Tabel 27**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesebelas**  
**Tahun 2019 dan 2020**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan	12 bulan	<b>100</b>	12 bulan	12 bulan	<b>100</b>
Nilai AKIP	A	B	<b>80</b>	86	88,03	<b>102,36</b>

- **Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel**

Pada tahun 2020 terlaksananya pelaporan berbasis web secara tertib tercapai 25%, dikarenakan terpenuhinya perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) yang memadai dan terpenuhinya kerangka laporan yang telah baku, sehingga pelaporan bisa terselesaikan secara tepat waktu. Laporan Kegiatan UPT BP2MI Bandung masih belum bisa dinilai sudah berbasis akuntabel dikarenakan masih terdapat data yang selisih pada Laporan Tahunan. Hasil perhitungan data bulanan secara manual dari setiap seksi dan P4TKI terkadang berbeda dengan data rekapitulasi pada Laporan Tahunan yang diserahkan kepada Sub Bag Tata Usaha.

- **Nilai AKIP**

Tercapainya nilai AKIP dengan nilai 88,03 diperoleh karena terdapat dukungan kegiatan pengendalian/pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin diselenggarakan oleh BP2MI. Adapun acuan dari pelaksanaan AKIP berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang sudah dirancang selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk penilaian AKIP mengacu pada nilai evaluasi Reformasi Birokrasi UPT BP2MI Bandung berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBBM yang sudah di evaluasi oleh Tim Penilai dari pusat.

## 12. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedua belas Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan

Tabel 28  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua belas  
Tahun 2019 dan 2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	-	-	-	75%	50%	<b>66,67</b>

- **Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)**

Pada tahun 2019 UPT BP2MI Bandung mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Instansi yang berpredikat wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk tahun 2020 terdapat perubahan nomenklatur dari UPT BP2MI Bandung menjadi UPT BP2MI Bandung dan sedang proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). Pada saat ini persiapan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM baru sebesar 50% dikarenakan perlu menambahkan dan melengkapi beberapa sarana prasarana yang menunjang pelayanan maksimal tetapi masih belum ada anggarannya.

### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT BP2MI Bandung ditunjang dengan anggaran yang berasal dari DIPA awal tahun 2020 sebesar Rp.11.011.909.000,-, namun pada akhir tahun terdapat Revisi Ke-6 dengan anggaran sebesar Rp. 10.876.793.000,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 10.728.735.778,- atau 98,64%. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2019 sebesar 14.171.115.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.441.786.163,- (98,60%) maka terjadi kenaikan sebesar 0,04%.

Secara keseluruhan kegiatan penyerapan anggaran pada UPT BP2MI Bandung tahun 2020 relatif tinggi dengan penyerapan sebesar 98,64% dari jumlah target 100%. Adapun penyerapan yang paling tinggi terdapat pada kegiatan Operasional Pos Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi dengan persentase 99,85% dikarenakan banyak kegiatan rutin yang harus mengeluarkan anggaran seperti biaya makan dan snack rapat, fotocopy dan penggandaan

berkas serta pengadaan seragam Petugas Bandara. Sedangkan penyerapan yang paling rendah terdapat pada kegiatan anggaran Pelayanan Mediasi dan Advokasi Perlindungan CTKI/TKI dengan persentase 94,58% dikarenakan kegiatan pelayanan mediasi dan advokasi CTKI/TKI sempat diberhentikan sementara waktu terkait pelaksanaan Sistem Kerja *Work From Home (WFH)* dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

**Tabel 29**  
**Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung Tahun 2020**

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020	
<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	: <b>BNP2TKI</b>
<b>UNIT KERJA</b>	: <b>UPT BP2MI BANDUNG</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	: <b>2020</b>

KEGIATAN/KOMPONEN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA
Peta Potensi TKLN Berbasis Permintaan :				
1. Pemetaan Potensi CTKI/TKI	330.760.000	327.890.728	99,13	2.869.272
CTKI/TKI yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural :				
1. Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	1.255.985.000	1.192.495.273	94,95	63.489.727
2. Pelatihan Pra Pemberangkatan Penempatan G To G	128.523.000	125.058.497	97,30	3.464.503
Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna :				
1. Pelayanan Mediasi dan Advokasi Perlindungan CTKI/TKI	16.260.000	15.379.000	94,58	881.000
2. Operasional Pos Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi	11.425.000	11.408.000	99,85	17.000
Fasilitasi Layanan Terpadu Satu Atap :				
1. Fasilitasi Layanan Terpadu Satu Atap	100.754.000	99.439.881	98,70	1.314.119
Layanan Dukungan Manajemen Satker :				
1. Layanan Ketatausahaan	606.101.000	597.989.967	98,66	8.111.033
Layanan Perkantoran :				
1. Gaji dan Tunjangan	4.429.205.000	4.401.547.789	99,38	27.657.211
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.997.770.000	3.957.526.643	98,99	40.243.357

**Tabel 30**  
**Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung Per Jenis Belanja Tahun 2020**

<b>REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 PER JENIS BELANJA</b>				
<b>MATA ANGGARAN</b>	<b>PAGU DIPA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA</b>
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	10.876.783.000	10.728.735.778	98,64	148.047.222
A. Belanja Pegawai	4.429.205.000	4.401.547.789	99,38	27.657.211
B. Belanja Barang/Jasa	6.447.578.000	6.327.187.989	98,13	120.390.011
C. Belanja Modal	0	0	0	0

**Tabel 31**  
**Realisasi Keuangan UPT BP2MI Bandung berdasarkan Belanja Tahun 2020**

<b>REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 PER BELANJA</b>					
<b>KODE</b>	<b>MATA ANGGARAN</b>	<b>PAGU DIPA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA</b>
<b>51</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.429.205.000</b>	<b>4.401.547.789</b>	<b>99,38</b>	<b>27.657.211</b>
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.597.256.000	2.581.762.376	99,40	15.493.624
5122	Belanja Lembur	16.056.000	16.039.000	99,89	17.000
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	1.815.893.000	1.803.746.413	99,33	12.146.587
<b>52</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>6.447.578.000</b>	<b>6.327.187.989</b>	<b>98,13</b>	<b>120.390.011</b>
5211	Belanja Barang Operasional	2.642.602.000	2.674.628.338	101,21	-32.026.338
5212	Belanja Barang Non Operasional	912.194.000	652.736.536	71,56	259.457.464
5218	Belanja Barang Persediaan	85.596.000	82.889.460	96,84	2.706.540
5221	Belanja Jasa	1.782.160.000	1.864.879.414	104,64	-82.719.414
5231	Belanja Pemeliharaan	212.572.000	238.448.789	112,17	-25.876.789
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	812.454.000	813.605.452	100,14	-1.151.452

## **E. KENDALA**

### **1. Seksi Penyiapan dan Penempatan**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya sistem Finger Print pada Penerbitan E-KTKLN (tidak ada fisik berupa Kartu) masih banyak TKI/CPMI yang mempertanyakan bukti bahwa E-KTKLN telah selesai diproses.

## 2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesulitan dalam menangani kasus mencari alamat PMI / memberikan info ke Keluarga PMI tentang permasalahan PMI dikarenakan tidak ada anggaran.
- 2) Pemanggilan P3MI untuk mediasi sangat sulit dikarenakan P3MI apabila dipanggil jarang yang datang bahkan banyak P3MI yang tutup.
- 3) *Counter* Bandara di Husein Sastranegara sudah tidak ada sehingga mengakibatkan pendataan keberangkatan dan kepulangan PMI tidak maksimal.
- 4) Edukasi kewirausahaan harus melibatkan mantan PMI Korea yang agak sulit untuk mendapatkannya dan kebanyakan sudah memiliki usaha sendiri.

## 3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya data dan informasi mengenai lowongan pekerjaan di sektor formal untuk tujuan Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya untuk diinformasikan kepada pencari kerja.
- 2) Masyarakat pencari kerja banyak yang belum mengetahui terkait adanya website jobsinfo ([jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id)) dan cara menggunakannya.

## 4. Sub Bagian Tata Usaha

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Masuknya Laporan dari setiap Seksi dan Satuan Kerja daerah masih sering terlambat.

## F. TINDAK LANJUT

### 1. Seksi Penyiapan dan Penempatan

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas memberikan penjelasan kembali mengenai kebijakan tentang perubahan KTKLN menjadi E-KTKLN.

## **2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Disnakertrans / P4TKI / LTSP walaupun info yang didapat agak terlambat.
- 2) Membuat surat ke Kedutaan walaupun jarang ada balasan.
- 3) Sudah menemui pihak-pihak yang berkepentingan dan juga untuk sementara Petugas Pendataan menunggu di depan pintu keluar.
- 4) Mencari informasi ke para mantan PMI Korea untuk mendapatkan data PMI Korea yang belum memiliki usaha sendiri.

## **3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan BP2MI (Direktorat Kerjasama Luar Negeri dan Direktorat Promosi) mengenai lowongan kerja yang tersedia di wilayah Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya;
- 2) Menjelaskan prosedur mendaftar melalui website [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id) kepada pencari kerja.

## **4. Sub Bagian Tata Usaha**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan setiap seksi-seksi untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

## BAB IV – PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. UPT BP2MI Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi semua pihak terutama masyarakat Propinsi Jawa Barat dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BP2MI Bandung berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, Program Kerja, Penetapan Kinerja antara Kepala BP2MI dengan Kepala UPT BP2MI Bandung maupun Rencana Strategis (Renstra) UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT BP2MI Bandung Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh UPT BP2MI Bandung pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Pelayanan Teknis di UPT BP2MI Bandung secara umum sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pelayanan Penempatan mulai dibuka kembali pada bulan Juni secara terbatas sehingga jumlah Pelayanan Penempatan masih rendah.
  - b. Hampir serupa dengan kondisi pelayanan penempatan yang diberhentikan sementara waktu, tidak semua jenis pelayanan perlindungan diberhentikan ada beberapa pelayanan kasus PMI Bermasalah yang masih dilakukan tetapi hanya sebatas penerimaan pelayanan kasus PMI Bermasalah melalui surat secara online. Hal ini menyebabkan persentase jumlah pelayanan perlindungan pun belum maksimal.
  - c. Menurunnya jumlah target dan capaian peta potensi PMI di Jawa Barat karena kurangnya informasi lowongan pekerjaan yang menarik minat CPMI. Selain itu sama halnya dengan pelayanan teknis lainnya, pelayanan jobs info pun masih belum maksimal karena pelaksanaan Sistem kerja *Work From Home (WFH)*



dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga para pencari informasi lowongan pekerjaan tidak bisa mendapatkan informasinya secara langsung hanya bisa melalui internet.

- d. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dengan terintegrasinya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK). Berbeda dengan pelayanan teknis lainnya, pengelolaan data di Sub Bagian Tata Usaha masih terus dikerjakan walaupun dilakukan di rumah masing-masing pegawainya.

## **B. SARAN**

1. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi;
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan UPT BP2MI Bandung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pusat dan daerah.

Bandung, 12 Januari 2021

Kepala,

Ttd.

Drs. Ade Kusnadi, M.M.

NIP. 19651212 199203 1 003



**LAMPIRAN**



**TABEL**  
**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI	<b>6.000</b>	1.500	257	1.500	0	1.500	347	1.500	1.381
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	<b>8 lokasi</b>	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	6 lokasi	6 lokasi
Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional	<b>32.000 PMI</b>	8.000 PMI	1.985 PMI	8.000 PMI	0	8.000 PMI	89 PMI	8.000 PMI	641 PMI
Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	<b>90%</b>	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%
Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah	<b>1.000 PMI</b>	250 PMI	188 PMI	250 PMI	0	250 PMI	0	250 PMI	0
Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	<b>100%</b>	25%	66,25%	25%	18,75%	25%	34,50%	25%	46,25%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	<b>30%</b>	7,5%	0,37%	7,5%	4,68%	7,5%	8,63%	7,5%	11,56%
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	<b>100%</b>	25%	2,26%	25%	5,33%	25%	5,79%	25%	2,70%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	<b>10%</b>	2,5%	0%	2,5%	0%	2,5%	0%	25%	0%
	Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural	<b>90%</b>	22,5%	21,47%	22,5%	0%	22,5%	2,82%	22,5%	17,33%
Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembang kan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	<b>350 orang</b>	88 orang	0	88 orang	0	87 orang	0	87 orang	0
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangkan dan mendapat pemberdayaan	<b>30 orang</b>	8 orang	0	8 orang	0	7 orang	0	7 orang	0
	Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha	<b>32%</b>	8%	0%	8%	0%	8%	0%	8%	0%



Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI	<b>792 PMI</b>	198 orang	0	198 orang	0	198 orang	0	300	0
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	<b>10%</b>	2,5%	0%	2,5%	0%	2,5%	0%	2,5%	0%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	<b>30 orang</b>	8 orang	1	8 orang	0	7 orang	5 orang	7 orang	17 orang
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	<b>12 bulan</b>	3 Bulan	3 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
	Nilai AKIP	<b>86</b>	86	88,03	86	88,03	86	88,03	86	88,03
Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	<b>75%</b>	75%	50%	75%	50%	75%	50%	100%	50%



**TABEL**  
**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 BERDASARKAN REALISASI TRIWULAN**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020				Capaian (%)
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Peta Potensi CPMI	Jumlah Potensi CPMI	<b>6.000</b>	257	0	347	1.381	<b>33,08</b>
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	<b>8 lokasi</b>	0 lokasi	0 lokasi	2 lokasi	6 lokasi	<b>100</b>
Meningkatnya penempatan PMI terampil dan profesional	Penempatan PMI terampil dan profesional	<b>32.000 PMI</b>	1.985 PMI	0 PMI	89 PMI	641 PMI	<b>2,28</b>
Meningkatnya kualitas sistem dan strategi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI	Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan	<b>90%</b>	100%	100%	100%	100%	<b>111,11</b>
Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah	PMI yang ditempatkan pemerintah	<b>1.000 PMI</b>	188 PMI	0 PMI	0 PMI	0 PMI	<b>18,8</b>
Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	<b>100%</b>	66,25%	18,75%	34,50%	46,25%	<b>165,75</b>
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna PMI	Persentase menurunnya permasalahan CPMI/PMI	<b>30%</b>	0,37%	4,68%	8,63%	11,56%	<b>138,13</b>
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	<b>100%</b>	2,26%	5,33%	5,79%	2,70%	<b>3,47</b>
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	<b>10%</b>	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
	Persentase meningkatnya PMI yang berangkat secara prosedural di kantong PMI non prosedural	<b>90%</b>	21,47%	0%	2,82%	17,33%	<b>67,44</b>
Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembang kan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	<b>350 orang</b>	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	<b>0</b>
	Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangkan dan mendapat pemberdayaan	<b>30 orang</b>	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	<b>0</b>



Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020				Capaian (%)
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase PMI Purna yang Menjadi Wirausaha	<b>32%</b>	0%	0%	0%	0%	<b>0</b>
	Jumlah PMI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung PMI	<b>792 PMI</b>	0 PMI	0 PMI	0 PMI	0 PMI	<b>0</b>
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/PMIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	<b>10%</b>	0%	0%	0%	0%	<b>0</b>
Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan PMI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	<b>30 orang</b>	1 orang	0 orang	5 orang	17 orang	<b>73,33</b>
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	<b>12 bulan</b>	3 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	<b>100</b>
	Nilai AKIP	<b>86</b>	88,03	88,03	88,03	88,03	<b>102,36</b>
Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan	Persentase pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM)	<b>75%</b>	50%	50%	50%	50%	<b>66,67</b>